



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA**  
**BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**  
**BULAN APRIL 2017**

**Pendahuluan**

Komnas HAM dapat dikatakan merupakan lembaga pertahanan terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 sampai dengan 30 April 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **472 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Kategori Berkas**

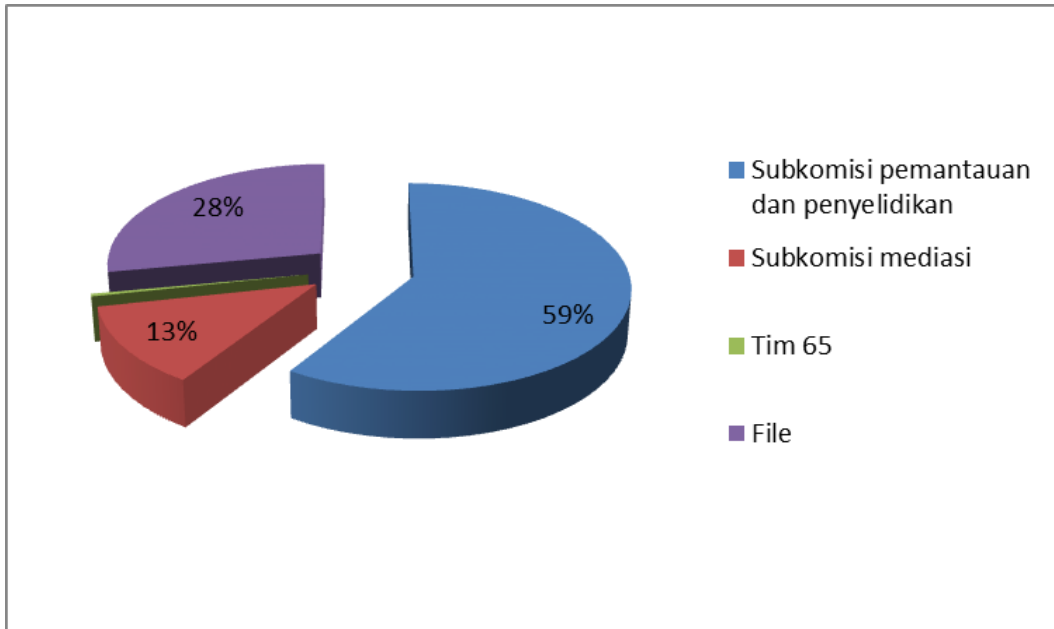
No	Kategori Berkas	Jumlah
1	Berkas Kasus Baru	<b>62</b>
2	Berkas Kasus Lanjutan	<b>410</b>
	Jumlah	<b>472</b>

## 2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	7	20	Kalimantan Barat	7
2	Sumatera Utara	39	21	Kalimantan Selatan	4
3	Bengkulu		22	Kalimantan Tengah	3
4	Jambi	6	23	Kalimantan Timur	9
5	Riau	8	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	26	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	17	26	Sulawesi Selatan	17
8	Lampung	8	27	Sulawesi Tenggara	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	28	Sulawesi Tengah	7
10	Kepulauan Riau	6	29	Sulawesi Utara	5
11	Banten	11	30	Sulawesi Barat	1
12	Jawa Barat	26	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	122	32	Maluku	11
14	Jawa Tengah	24	33	Maluku Utara	1
15	Jawa Timur	39	34	Papua	8
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	3	35	Papua Barat	2
17	Bali	6	36	Tanpa Alamat	32
18	Nusa Tenggara Barat	5			
19	Nusa Tenggara Timur	4	Jumlah		472

## 3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	279
2	Subkomisi mediasi	59
3	Tim 65	2
4	File	132
Jumlah		472



#### 4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	259
2	Tembusan	210
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	3
Jumlah		472

#### 5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	53
2	Pos	365
3	Fax	11
4	Email	27
5	Online	5
6	Audiensi	8
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	3
Jumlah		472

## 6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	7
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	172
5	Hak atas kebebasan pribadi	14
6	Hak atas rasa aman	31
7	Hak atas kesejahteraan	181
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	2
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	
12	Non HAM	59
Jumlah		472

### 6.1. Klasifikasi pengaduan

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	1
Lingkungan hidup	6
	7
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
	5
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	138
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	7
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	24
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
	172
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	10

Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	1
Berkumpul, berapat, dan berserikat	1
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	14
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	
Mencari suaka	
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	4
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	7
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	2
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	7
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	11
	31
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	10
Hak atas kepemilikan tanah	80
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	34
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	18
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	32
Hak atas kesehatan	4
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
	181
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	1
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	
	2
<b>IX. Hak perempuan</b>	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	1
Hak atas kesetaraan dengan suami	
	1
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	0
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	0
<b>XII. Non HAM</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	59
<b>Jumlah Seluruh</b>	<b>472</b>

## 7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Korporasi	2
2	Lembaga pendidikan	1
3	Individu - Orang seorang	228
4	Individu – Anak	7
5	Individu – Perempuan	13
6	Individu - Buruh migran	1
7	Individu - Pekerja/Profesi	29
8	Individu – Suku	
9	Individu - Ras dan etnis	
10	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	
11	Individu - Penyandang cacat	
12	Individu – LGBT	
13	Individu – Teroris	
14	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
15	Individu – Lansia	
16	Individu - Fakir Miskin	

17	Individu – Narapidana	7
18	Kelompok – Masyarakat	111
19	Kelompok - Anak anak	
20	Kelompok – Perempuan	
21	Kelompok - Buruh Migran	
22	Kelompok – Pekerja	20
23	Kelompok - Masyarakat Adat	14
24	Kelompok - Ras dan Etnis	1
25	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	8
26	Kelompok - Penyandang Disabilitas	
27	Kelompok – LGBT	1
28	Kelompok – Teroris	
29	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	
30	Kelompok – Lansia	
31	Kelompok - Fakir miskin	
32	Kelompok – Narapidana	
33	Organisasi	4
34	Warga Negara Asing (WNA)	3
35	Tanpa Keterangan Pihak Korban	20

## 8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	43
2	Pemerintah daerah	50
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (non kementerian)	11
5	Lembaga peradilan	33
6	POLRI	160
7	TNI	22
8	Kejaksaan	15
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	7
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	56
12	BUMN/BUMD	28
13	Lembaga pelayanan kesehatan	1
14	Lembaga pendidikan	8
15	Individu - Orang seorang	5
16	Individu – Anak	
17	Individu – Perempuan	1
18	Individu - Buruh migran	
19	Individu - Pekerja/Profesi	2
20	Individu – Suku	

21	Individu - Ras dan etnis	
22	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	
23	Individu - Penyandang cacat	
24	Individu – LGBT	
25	Individu – Teroris	
26	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	
27	Individu – Lansia	
28	Individu - Fakir Miskin	
29	Individu – Narapidana	
30	Kelompok – Masyarakat	5
31	Organisasi	2
32	Warga Negara Asing (WNA)	
33	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	22

**9. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi serta ditangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah**

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999<sup>1</sup>, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999<sup>2</sup> dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan April 2017 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

**Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi**

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
5	24	17	46

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, **diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.**

<sup>1</sup> Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi  
<sup>2</sup> Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi



## 10. Penomoran kasus untuk pengaduan baru 1 (satu) kali

Periode April 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan memberikan nomor kasus untuk berkas pengaduan baru 1 (satu) kali dengan perincian distribusi sebagai berikut:

Pemantauan	Mediasi	Jumlah
51	11	62

### B. Kegiatan Rutin Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan telah menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

#### Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan Proaktif di daerah

Pada 19 – 22 April 2017, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan melaksanakan Kegiatan Konsultasi dan Penerimaan Pengaduan Pro Aktif di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tim yang bertugas terdiri dari Otto Nur Abdullah, Rima Purnama Salim, A. A. Rajab, Ceria Alamiyati dan Luluk Sapto Setiyawan. Rangkaian acara yang dilaksanakan selama kegiatan tersebut adalah:

- a. Pembukaan Pos Pengaduan Komnas HAM di:
  1. Sekretariat LSM Aspirasi Peduli Inspirasi (LSM API) pada 20 April 2017 pukul 10.00 s/d 15.00 WIB;
  2. Balai Kelurahan Baleharjo, Kab. Pacitan, Jawa Timur pada 21 April 2017 pukul 10.00 s/d 15.00 WIB.
- b. FGD (diskusi terbatas) di Balai Kelurahan Baleharjo, Kab. Pacitan, Jawa Timur pada 21 April 2017 pukul 10.00 s/d 11.30 WIB;
- c. *Talkshow* di Radio Grindulu FM saluran 104,6 Mhz pada 20 April 2017; dan
- d. *Talkshow* di Radio Rasda FM saluran 93,5 Mhz pada 20 April 2017.

### C. Kegiatan Lainnya:

#### Diskusi Bulanan

Disamping kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan diatas, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan melaksanakan kegiatan lainnya yaitu Diskusi Bulanan. Pada 25 April 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mengadakan kegiatan diskusi bulanan dengan tema **“Pengejawantahan *Service Excellence* di dalam lembaga pelayanan Publik”** dengan narasumber yaitu Dosen Kriminologi Universitas Indonesia Sdr. Bhakti Eko Nugroho, S.Sos., M.A.

#### **D. Rencana Kegiatan Satu Bulan Ke Depan**

Bersama ini disampaikan rencana kegiatan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan selama satu bulan ke depan dengan rincian sebagai berikut:

##### **Diskusi Bulanan Mei 2017**

Diskusi bulan Mei 2017 akan dilaksanakan dengan narasumber Kasubbag Dukungan Pengkajian dan Penelitian Hak-Hak Sipil Politik Komnas HAM Sdr. Elfansuri Chairah. Kegiatan untuk sementara dijadwalkan pada 10 Mei 2017. Adapun PIC dalam kegiatan ini adalah Sdr. Reza Perdana.

#### **E. Penutup**

Demikian laporan bulanan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan mandat yang telah diberikan.

Jakarta, 30 April 2017

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM**  
**KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN**

**Rima Purnama Salim**